

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri A);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri A) Tanggal 2 Januari Tahun 2015;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E)
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 121.05/Kep.41-Bappeda/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan Gubernur Jawa Barat Tahun 2016.

1.2. Gambaran Umum Jawa Barat

1.2.1. Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 38.126,54 km² dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Sebaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan dengan batas wilayahnya meliputi:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.1
Sebaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM ²)	% TERHADAP LUAS WILAYAH JAWA BARAT
1	Bogor	2.997,13	7,86
2	Sukabumi	4.160,75	10,91
3	Cianjur	3.594,65	9,43
4	Bandung	1.756,65	4,61
5	Garut	3.094,40	8,12
6	Tasikmalaya	2.702,85	7,09

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM ²)	% TERHADAP LUAS WILAYAH JAWA BARAT
7	Ciamis	2.740,76	7,19
8	Kuningan	1.189,60	3,12
9	Cirebon	1.071,05	2,81
10	Majalengka	1.343,93	3,52
11	Sumedang	1.560,49	4,09
12	Indramayu	2.092,10	5,49
13	Subang	2.164,48	5,68
14	Purwakarta	989,89	2,6
15	Karawang	1.914,16	5,02
16	Bekasi	1.269,51	3,33
17	Bandung Barat	1.335,60	3,5
18	Pangandaran	1.010,00	2,65
19	Kota Bogor	111,73	0,29
20	Kota Sukabumi	48,96	0,13
21	Kota Bandung	168,23	0,44
22	Kota Cirebon	40,16	0,11
23	Kota Bekasi	213,58	0,56
24	Kota Depok	199,44	0,52
25	Kota Cimahi	41,2	0,11
26	Kota Tasikmalaya	184,38	0,48
27	Kota Banjar	130,86	0,34
Total Prov. Jawa Barat		38.126,54	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2016

Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan luas 4.160,75 km² atau sekitar 10,91% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan wilayah terkecil di Provinsi Jawa Barat adalah wilayah Kota Cirebon yaitu seluas 40,16km² atau sekitar 0,11% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat memiliki topografi berupa wilayah pegunungan curam (9,5%) yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl), serta wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) yang terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl, dan wilayah daratan landai (54,02%) yang terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 m dpl. Wilayah Jawa Barat memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,40C -30,70C dan kelembaban udara 73% - 84%.

1.2.2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, jumlah penduduk Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak 47.379.189 jiwa yang terdiri dari 24.011.089 jiwa penduduk laki-laki dan 23.368.100 jiwa penduduk perempuan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2016 tercatat sebesar 1,43%. dengan rata-rata kepadatan penduduk adalah 1.339 jiwa/Km². Jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2016

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1. Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	45.340.800	46.029.6	46.709.6	47.379.189
a. Laki-laki	Ribu Jiwa	23.004.300	23.345.3	23.681.0	24.011.089
b. Perempuan	Ribu Jiwa	22.336.500	22.684.3	23.028.6	23.368.100
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,77	1,52	1,47	1,43
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km ²	1.222	1.241	1.259	1.339

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013-2015

Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sebanyak 5.587.390 jiwa(11,78% dari penduduk Jawa Barat) dan wilayah dengan penduduk paling kecil adalah Kota Banjar dengan jumlah penduduk 181.901 jiwa (0.38% terhadap penduduk Jawa Barat). Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Bandung sebesar 14.805 jiwa/Km² dan terendah ada di Kabupaten Pangandaran yaitu 389 jiwa/Km². Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2016 meningkat sebanyak 669.820 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya untuk data sebaran dan kepadatan penduduk Jawa Barat per kabupaten dan kota dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Sebaran dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	% TERHADAP PENDUDUK TOTAL JAWA BARAT	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
1	Bogor	5.587.390	11,79	1.864
2	Sukabumi	2.444.616	5,16	588
3	Cianjur	2.250.977	4,75	626
4	Bandung	3.596.623	7,59	2.047
5	Garut	2.596.505	5,42	830
6	Tasikmalaya	1.742.276	3,68	645
7	Ciamis	1.175.389	2,48	429
8	Kuningan	1.061.886	2,24	893
9	Cirebon	2.142.999	4,52	2.001
10	Majalengka	1.188.004	2,51	884

11	Sumedang	1.142.097	2,41	732
12	Indramayu	1.700.815	3,59	813
13	Subang	1.546.000	3,26	714
14	Purwakarta	932.701	1,97	942
15	Karawang	2.295.778	4,85	1.199
16	Bekasi	3.371.691	7,12	2.656
17	Bandung Barat	1.648.387	3,48	1.234
18	Pangandaran	392.817	0,83	389
19	Kota Bogor	1.064.687	2,25	9.529
20	Kota Sukabumi	321.097	0,68	6.558
21	Kota Bandung	2.490.662	5,26	14.805
22	Kota Cirebon	310.486	0,66	7.731
23	Kota Bekasi	2.787.205	5,88	13.050
24	Kota Depok	2.179.813	4,60	10.390
25	Kota Cimahi	594.021	1,25	14.418
26	Kota Tasikmalaya	659.606	1,39	3.577
27	Kota Banjar	181.901	0,38	1.390
Total Prov. Jawa Barat		47.379.389	100	1.219

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

1.2.3. Aspek Ketenagakerjaan

Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan penduduk Provinsi Jawa Barat terdiri atas 1) Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas), 2) Penduduk Angkatan Kerja, 3) Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas), dan 4) Penganggur (Mencari Kerja). Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) berjumlah 34,75 juta jiwa, jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) tersebut mengalami pertumbuhan 1,85 persen dibandingkan keadaan penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2015. Jumlah angkatan kerja mencapai 21,10 Juta orang, naik sebesar 489.543 orang dibandingkan keadaan Agustus 2015 (20.59 juta orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2016 mengalami kenaikan sekitar 0,31 persen poin, yaitu dari 60,34 persen pada Agustus 2015 menjadi 60,65 persen pada Agustus 2016.

Selama kurun waktu satu tahun, tercatat kenaikan jumlah penganggur sebanyak 78.987 orang. Pada Agustus 2015, penganggur di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.794.874 orang, sedangkan pada bulan Agustus 2016 tercatat penganggur sebanyak 1.873.861 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen poin dari 8,72 persen pada Agustus 2015 menjadi 8,89 persen pada Agustus 2016. Seiring dengan meningkatnya angka Indikator Penganggur (Mencari Kerja) terdapat beberapa indikator ketenagakerjaan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 3) Serapan Tenaga Kerja. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2016

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN	SATUAN	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
a. PendudukUsiaKerja (15 tahunkeatas)	Juta jiwa	32,83	33,47	34,12	34,75
b. Penduduk Angkatan Kerja	Juta jiwa	20,62	21,01	20,59	21,08
c. Penduduk Bekerja (15 tahun keatas)	Juta jiwa	18,37	19,23	18,79	19,20
d. Penganggur (orang)	Juta jiwa	1,89	1,78	1,79	1,87
e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	62,82	62,77	60,34	60,65
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,16	8,45	8,72	8,89
g. Serapan Tenaga Kerja	Orang	207.955	477.045	420.000	401.271

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2013-2016

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk berusia 15 tahun ke atas Provinsi Jawa Barat terdiri atas penduduk 1) Berusaha Sendiri, 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3) Berusaha dibantu buruh tetap, 4) Buruh/Karyawan, 5) Pekerja Bebas, dan 6) Pekerja Keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan utama tersebut berjumlah 19.202.038 jiwa pada Tahun 2016 dan diantara itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama sebagai Buruh/Karyawan memiliki jumlah terbesar yaitu sebanyak 9.090.674 jiwa (47,34%) pada Tahun 2016. Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2016

STATUS PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS 2015		AGUSTUS 2016	
	JUMLAH (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	%
1. Berusaha Sendiri	3.411.074	18,15	3.482.438	18,14
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	1.971.380	10,49	1.983.549	10,33
3. Berusaha dibantu buruh tetap	633.037	3,37	770.741	4,01
4. Buruh/Karyawan	8.689.172	46,24	9.090.674	47,34
5. Pekerja Bebas	2.750.912	14,16	2.648.772	13,79
6. Pekerja Keluarga	1.335.907	7,11	1.225.864	6,38
Total	18.791.482	100	19.202.038	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014-2016

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat 2016 jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama sebagai Buruh/Karyawan tersebut jumlahnya mengalami peningkatan dari 8.689.172 jiwa pada Tahun 2015 menjadi

9.090.674 jiwa pada Tahun 2016. Peningkatan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama sebagai Buruh/Karyawan tersebut mengindikasikan pertumbuhan lapangan kerja bagi penduduk Provinsi Jawa Barat.

Selama kurun waktu 2015 – 2016 terjadi trend peningkatan pada jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yaitu 1) Industri, 2) Listrik, Gas dan Air, 3) Konstruksi, 4) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, 5) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, dan 6) Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang terbesar yaitu pada sektor konstruksi yaitu dari 1.691.596 jiwa pada Tahun 2015 menjadi 1.424.529 jiwa pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar 267.067 jiwa. Penduduk Provinsi Jawa Barat yang bekerja terbanyak diserap pada lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, yaitu 5.338.698 orang (27,80 persen). Lapangan usaha berikutnya yang menyerap tenaga kerja terbanyak di Provinsi Jawa Barat adalah industri (20,23 persen), jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (17,18 persen) dan lapangan usaha pertanian (16,43 persen).

Beberapa indikator jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang masih perlu ditingkatkan ke depan adalah 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan, 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2016

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS 2015		AGUSTUS 2016	
	JUMLAH (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	%
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan	3.095.547	16,47	3.154.509	16,43
2. Pertambangan dan Penggalian	136.943	0,73	113.601	0,59
3. Industri	3.945.316	21,00	3.884.668	20,23
4. Listrik, Gas dan Air	68.478	0,36	60.971	0,32
5. Konstruksi	1.691.596	9,00	1.424.529	7,42
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	5.101.162	27,15	5.338.698	27,80
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.036.915	5,52	1.112.414	5,79
8. Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	669.791	3,56	814.691	4,24
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	3.045.734	16,21	3.297.957	17,18
Total	18.791.482	100	19.202.038	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015-2016

1.2.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan metoda perhitungan baru yang dilakukan BPS, seluruh komponen indikator IPM Jawa Barat meningkat, yaitu dari 69,50 poin pada Tahun 2015 menjadi sebesar 70,19 poin pada Tahun 2016. Keberhasilan tersebut dicapai dari Indeks Pendidikan sebesar 61,39 poin, Indeks Kesehatan 81,05 poin dan Indeks Daya Beli Pengeluaran mencapai 69,51 poin. Komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan

indeks daya beli mengalami peningkatan dari 69,49 poin pada Tahun 2015 menjadi 70,19 poin pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,70 poin.

Indeks Kesehatan dicapai melalui Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dengan kata lain, AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Untuk Jawa Barat sendiri, melihat kecenderungan data yang ada sejak tahun 2013, AHH terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 mencapai 72,68 tahun.

Indeks Pendidikan dicapai melalui Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari mulai sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Dengan kata lain RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Peningkatan RLS Jawa Barat pada tahun 2016 adalah 7,90 tahun. Penduduk Jawa Barat rata-rata menempuh pendidikan formal setingkat SMP kelas 2 dan setara dengan rata-rata tingkat pendidikan formal penduduk Indonesia. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. RLS dapat dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah

Standar hidup layak dihitung dengan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah. Pengeluaran per kapita Jawa Barat tahun 2014 tercatat sebesar 9,45 juta rupiah lebih rendah dibandingkan angka Nasional yaitu 9,9 juta rupiah. Di tahun 2015 pengeluaran per kapita tercatat sebesar 9,78 juta rupiah dan meningkat menjadi 9,79 juta.

Dengan meningkatnya seluruh komponen indikator IPM Jawa Barat tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi dengan kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2013-2016 seperti disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014 METODE LAMA	2014 METODE BARU	2015 METODE BARU	*2016
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,40	74,28	68,80	69,49	70,19
a. Indeks Kesehatan (IK)	Poin	72,99	74,01	80,35	80,80	81,05
a.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,80	68,85	72,23	72,52	72,68
b. Indeks Pendidikan (IP)	Poin	82,31	83,36	59,26	60,45	61,39
b.1. Angka Melek Huruf (AMH)	persen	96,49	98,29	98,29	98,29	12,62
b.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,09	7,71	7,71	7,76	7,90
c. Indeks Pengeluaran	Poin	64,89	65,47	68,40	68,69	69,51
c.1. Pengeluaran	ribu rupiah	640,80	644,36	9.447,16	9.538,93	9.796,76

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , *) Angka sementara perhitungan IPM BPPAPD 2017

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya adalah tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

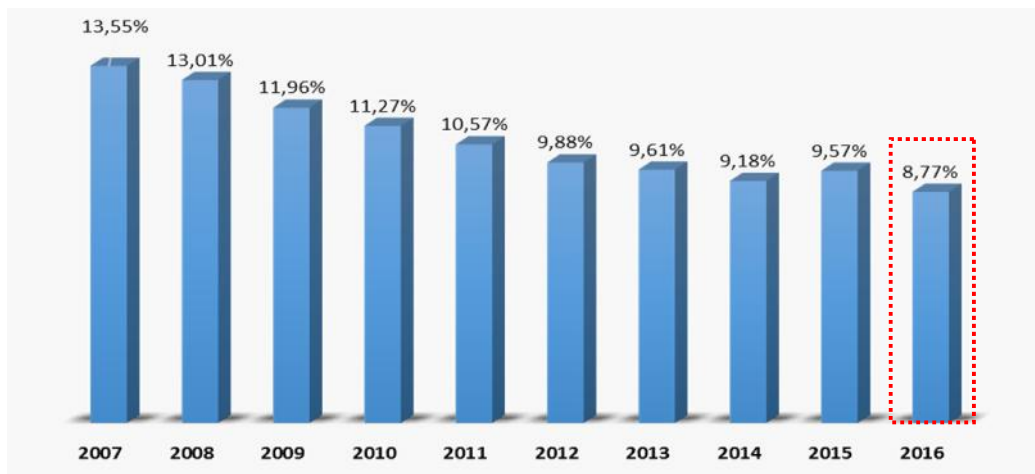
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 4,85 juta jiwa dan menurun menjadi 4,17 juta jiwa pada tahun 2016. Pemerintah Jawa Barat dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 9,57% pada Tahun 2015 menjadi 8,77% pada Tahun 2016. Artinya pada periode Tahun 2015 sampai 2016 Pemerintah Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,8%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sampai 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.8 dan perkembangan penduduk miskin di Jawa Barat dari tahun 2007 sampai dengan 2016 dapat dilihat Gambar 1.1.

Tabel 1.8
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2015	2016
Jumlah Penduduk Miskin	juta jiwa	4,85	4,17
Persentase Penduduk Miskin Terhadap Total Penduduk	Persen	9,57	8,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2015-2016

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2007-2016

Dari tahun 2015-2016 terlihat bahwa adanya penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat, dimana penurunan tingkat kemiskinan mencapai 0,80%. Jika dibandingkan dengan angka persentase tingkat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, Jawa Barat berada di atas angka nasional, dimana tingkat penurunan kemiskinan nasional mencapai 0,43% atau dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 10,70% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlambatan penurunan kemiskinan di Jawa Barat dari target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi nasional, hal ini diperkuat dengan terjadinya kenaikan harga pangan terutama beras sebagai komponen utama konsumsi masyarakat miskin sebesar 29 persen dari 65 persen bahan makanan pada penghitungan garis kemiskinan dari bulan Februari – September 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama tahun 2015-2016.

Jika dilihat dari persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,08% (11,80% menjadi 11,72%). Begitu juga dengan daerah perkotaan turun sebesar 0,12% (7,67% menjadi 7,55%). Salah satu penyebabnya adalah akses dan infrastruktur yang kurang memadai di daerah pedesaan. Selain itu kualitas sumber daya manusia di pedesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan (BPS, 2016).

Upaya penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat, yang secara simultan dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah khususnya indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya. (BPS Jawa Barat, 2016).

1.2.5. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal yang ditunjukkan antara lain dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 1.275,55 Triliun Rupiah (adhb), sedangkan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 5,67%, angka tersebut masih di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat, dalam hal ini PDRB per kapita tanpa migas dapat dianggap sebagai proxy pendapatan masyarakat daerah, secara riil mengalami pertumbuhan dari Rp. 32,64 Triliun pada Tahun 2015 menjadi Rp. 34,88 Triliun pada Tahun 2016 (adhb) atau meningkat sebesar Rp. 2,24 Triliun. Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9
Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2016

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
			2015	2016
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			
	a. Nilai PDRB :			
	1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	triliun rupiah	1.524,83	1.652,59
	2. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	triliun rupiah	1.207,08	1.275,55
	b. PDRB per Kapita :			
	1. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	ribu rupiah	32,64	34,88
	2. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	ribu rupiah	25,84	26,92
	c. Investasi (PMTB adhb)	triliun rupiah	382,99	412,30
	d. Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) adhb	persen	29,53	7,65
	e. Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) adhk	persen	4,16	4,59
	f. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah :			
	1. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhb)	triliun rupiah	98,29	105,73
	2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhk)	triliun rupiah	65,95	68,43
	g. Ekspor :			
	1. Ekspor (adhb)	triliun rupiah	559,71	609,40
	2. Ekspor (adhk)	triliun rupiah	422,40	436,51
	h. Impor :			
	1. Impor (adhb)	triliun rupiah	585,40	640,22
	2. Impor (adhk)	triliun rupiah	390,25	396,72
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,06	5,67
3	Inflasi	persen	2,73	2,75
4	Indeks Gini	Poin	0,41	0,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015-2016

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat ditunjukkan juga oleh angka inflasi dan Indeks Gini. Inflasi Provinsi Jawa Barat dapat ditekan dari 2,73% pada Tahun 2015 menjadi 2,75% pada Tahun 2016. Kondisi LPE dan penekanan inflasi di Provinsi Jawa Barat berjalan cukup baik. Kondisi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Besaran Indeks Gini Jawa Barat dengan menggunakan data Tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa Indeks Gini sebesar 0,41 poin artinya Indeks Gini Jawa Barat tidak mengalami peningkatan. Artinya kondisi ini tidak menunjukkan adanya kenaikan ketimpangan pendapatan.